Kybernology **ISSN 3031-1063**
Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Volume 4 Nomor 1, Juni 2026
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology

OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA BENU KECAMATAN TAKARI KABUPATEN KUPANG
(Studi kasus desa benu, kecamatan takari, kabupaten kupang)

Bertha Lavenia Ekaputri [1], Melkisedek.N.B.C.Neolaka[2], Made.N.D.Andayana[3]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana, Indonesia[1,2,3]
E-mail: laveniaekaputri@gmail.com[1]

ABSTRACT
This study aims to analyze the optimization of the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in improving the community's economy in Benu Village, Takari District, Kupang Regency. The study employed a qualitative method with a descriptive approach, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that the management of BUMDes has been carried out through the main management functions, namely planning, organizing, implementation, and supervision. However, several challenges remain, including limited human resources, inadequate business analysis, and the suboptimal utilization of technology. The existence of BUMDes has contributed positively to improving the local economy by creating employment opportunities and providing economic services for the village community. Therefore, enhancing the capacity of BUMDes managers, encouraging business innovation, and strengthening support from the village government are essential to optimize the sustainable role of BUMDes.

Keywords: *Village-Owned Enterprises (Bumdes), Management, Village Economy, Community Empowerment*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes telah dilakukan melalui fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya analisis usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. BUMDes memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penyediaan layanan ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan

kapasitas pengelola, inovasi usaha, serta dukungan pemerintah desa untuk mengoptimalkan peran BUMDes secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Bumdes, Pengelolaan, Ekonomi Desa, Pemberdayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur atau mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa, dalam pengambilan kebijakan memiliki wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang menjadi substansi deskripsi bahwa pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mengelola atau mengatur sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah guna untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Keberadaan desa sesungguhnya memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengelola wilayahnya. Karena Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Desa berlandaskan pada beberapa asas yaitu asas rekognisi, asas kebersamaan, asas subsidiaritas, asas keberagaman, asas kegotong- royongan, asas kekeluargaan dan asas musyawarah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 3). Sumber dana desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Dalam konsep pengelolaan dana desa, pengambilan kebijakan pada bidang pembangunan desa diantaranya yaitu sarana prasarana sosial, usaha ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan judul penelitian dari peneliti yang menjadi hal penting untuk diteliti yaitu peningkatan dibidang ekonomi, karena merupakan tonggak dasar menuju desa yang mandiri dan sejahtera.

Menutut Mubyarto (2000) strategi untuk meningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, maka diarahkan untuk mendorong pembahasan struktur yaitu dengan menguatkan status serta peran masyarakat desa dalam perekonomian nasional. Perubahan ini meliputi proses peralihan dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh dan mandiri. Salah satu metode untuk mengembangkan dibidang ekonomi dan atau menambah aset desa yaitu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

Menurut Puguh (2015) untuk mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunyan adalah melalui lembaga peningkatan bidang ekonomi

yang berada di tingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa, lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sabagai saran untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa. Sifat usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah berorentasi pada keuntungan dan sistem pengelolaan usahanya adalah kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dalam Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 yang mengatakan wajib mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Oleh karena itu perlu adanya upaya serius untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta proses pengelolaan agar berjalan efektif, efisien, proporsional dan mandiri. Agar tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa. Pengelola lembaga ini disebut sebagai badan pengurus Badan Usaha Milik Desa. Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP, 2007) untuk mencapai kondisi tersebut strategi yang digunakan adalah mengintegrasi pontensi, kebutuhan dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disisi lain diperlukan pontensi lokalistik serta dukungan kebijakan atau Good Will dari pemerintah diatasnya agar mengelimir rendah surplus kegiatan ekonomi desa.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi usaha desa yang paling dominan untuk menggerakkan usaha bidang ekonomi Desa. Lembaga ini dapat memberikan pelayanan kepada non anggota diluar desa dengan mendapatkan harga dan pelayanan yang berlaku dengan standar pasar artinya terdapat mekanisme/tata aturan kelembagaan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan. Keadaan ekonomi masyarakat yang belum baik, mengakibatkan dampak kurang baik terhadap kehidupan masyarakat seperti meningkatnya pengangguran dan terbatasnya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu atas inisiatif pemerintah Desa dengan bermusyawarah bersama masyarakat yang jenis usaha sesuai dengan potensi alam dan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) dari masyarakat Desa. Tersedianya sumber daya alam desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa, adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan terakomodasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Terkait pengelolaan badan usaha milik desa yang telah

dibentuk oleh masyarakat bersama pemerintah desa dipandang perlu untuk dioptimalisasi. Menurut Ali (2014) Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi adalah suatu perbaikan dan evaluasi serta peningkatan kualitas kerja demi tercapainya tujuan, Maka apabila dipandang dari sudut usaha dapat diketahui bahwa optimalisasi dapat diwujudkan apabila ada perwujudannya yang secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan. Maka yang hal yang didorong adalah bagaiman sumber daya manusia yang berkeja secara profisional dan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam lembaga atau masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga desa yang bergerak untuk meningkatkan ekonomi dan dikelola oleh masyarakat desa. Adapun sumber anggaran yaitu dari pemerintah desa yang dialokasikan berdasarkan kebutuhan lembaga. Pengelolaan BUMDes secara kooperatif, partisipasi, emansipatif, tranparansi, akuntabilitas dan sustainabel. Dalam menjalankan sistem kerjanya tentu dilakukan secara efektif, efisien dan profeisional demi tercapainya tujuan Badan Usaha Milik Desa bagi kesejahteraan Masyarakat Desa. Karena lembaga Badan Usaha Milik Desa memiliki peran yang penting untuk peningkatan bidang perekonomian masyarakat dan menambah pendapatan asli desa.

Menurut Widyastuti (2017) ada beberapa kabupaten, terdapat banyak desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa ada yang secara mandiri dalam mengembangkan pontensi ekonomi desa yang ada dan juga yang didorong oleh Pemerintah Kabupaten setempat dengan diberikan siklus pemodalan awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dana hiba dengan status dana milik masyarakat desa menjadi saham Badan Usaha Milik Desa. Dengan situasi dan kondisi di Desa Benu yaitu diduga Badan Usaha Milik Desa belum dikelola dengan baik demi mengembangkan aset desa melalui Badan Usaha milik Desa (BUMDes) Benu.

Desa Benu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang mayoritas masyrakatnya bermata pencarian petani yang hasil taninya diharapkan mampu menopang kondisi ekonomi tersebut namun karena kondisi geografis Kabupaten Kupang Yang kering menyebabkan masyrakat mencari pekerjaan lainnya agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satu yang menjadi unggulan bagi masyrakat di Desa Benu dalam bidang pertanian adalah usaha padi masyrakat desa ini mengolah lahannya dalam benuk persawahan yang ditanami padi, diharapkan hasil pertanian padi ini dapat meningkatkan pendapatkan masyrakat Desa ini khususnya untuk para petani dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa ini.

Pengelolaan Bumdes di Desa Benu tidak berjalan disebabkan karena

Sumber Daya Pengurusnya Kurang Suplay Dana Dari Pemerintah Desa Kurang.

Pemerintah Desa Benu, dalam menentukan kebijakan relative melakukan proses musyawarah dimulai dari tingkat dusun. Dalam musyawarah ini dimulai dari pembahasan program kerja untuk meningkatkan persoalan tersebut.

Adapun proses dan kondisi ekonomi masyarakat Desa Benu yaitu (1) Data Pengelolaan Bumdes yaitu sesuai pengamatan sementara terlihat bahwa pemanfaatan potensi desa Benu belum maksimal, hal ini dilihat dari kondisi lahan pertanian masih banyak yang kosong dan dibiarkan tanpa digarap oleh pemiliknya, dan peternakan yang dikelola masyarakat desa Benu belum banyak di produksi untuk dijual ke pasar-pasar local daerah maupun di luar daerah, dan juga potensi keindahan alam (mata air dan alam pegunungan) sepi pengunjung karena pemerinta maupun masyarakat tidak mengemasnya secara aktraktif untuk menarik minat para wisatawan, sehingga banyaknya para pemuda yang memilih berangkat merantau ke daerah lain dari pada bertahan di desanya karena kurangnya potensi desa yang bisa dimanfaatkan, hal ini diduga disebabkan oleh belum optimalnya kerja Badan Usaha Milik Desa seperti kurangnya pemahaman pengurus dalam mengidentifikasi potensi desa, pemetaan potensi dan skala prioritas program, kurangnya kegiatan pendampingan secara kelembagaan kepada pengurus tentang cara mengelola keuangan lembaga dengan efektif dan efisien sehingga usaha yang dibuat oleh BUMDes masih jalan ditempat bahkan mengalami penurunan, belum memanfaatkan gedung BUMDES sejak didirikannya sebagai sarana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap program kerja.

Berikut merupakan data terkait perkembangan Badan Usaha Milik Desa Benu. Data dibawah ini merupakan suatu perkembangan BUMDes di Desa Benu selama satu tahun terakhir saja. Adapun penyebab dalam perkembangannya dimana terjadi fluktuasi akan perkembangan sebab kinerja dari badan pengurus dan pengawasan badan permusyawaratan desa serta pemerintah desa sekalipun minim akan pengawasan dan audit terkait dengan kebijakan untuk alokasi anggaran di lembaga tersebut. Untuk data dibawah ini, merupakan gambaran akan degradasi kinerja dan perlu dioptimalisasi kembali menuju perkembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat desa Benu.

Tabel 1.1.2 Jenis Pekerjaan di Desa Benu Tahun 2020

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Pegawai Swasta	-
TNI	-
Wiraswasta	11
Pensiunan	9
Petani	456
Nelayan	-
PNS	44

(Sumber:https://kupangkab.bps.go.id)

Kybernology **ISSN 3031-1063**
Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Volume 4 Nomor 1, Juni 2026
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang, mayoritas masyarakat Desa Benu bekerja sebagai petani (456 orang), sehingga sektor pertanian menjadi sumber utama penghidupan. Sementara itu, jumlah PNS sebanyak 44 orang, wiraswasta 11 orang, dan pensiunan 9 orang. Tidak terdapat pekerjaan pada sektor pegawai swasta, nelayan, maupun TNI.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi desa masih didominasi sektor pertanian dan belum beragam. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sektor lain, seperti melalui BUMDes, untuk meningkatkan peluang usaha dan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Informan penelitian.

No	Nama Informan	Jabatan/ Peran	Teknik Penentuan	Alasan pemilihan keterangan
1	Kepala Desa Benu	Kepala Desa	PurposiveSampling	Mengetahui kondisi desa, kebijakan, dan kegiatan BUMDes secara menyeluruh
2	Ketua BUMDes Benu	Ketua BUMDes	Purposive Sampling	Berperan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan desa
3	Pengurus BUMDes Benu	Ketua/ Pengelola BUMDes	Purposive Sampling	Pihak yang menjalankan langsung operasional BUMDes
4	Sekertaris BUMDes Benu	Sekertaris	Purposive Sampling	Mengelola administrasi dan keuangan BUMDes
5	Masyarakat Desa Benu	Warga/ pengguna layanan BUMDes	Accidental Sampling	Dipilih berdasarkan ketersediaan saat penelitian berlangsung

KAJIAN PUSTAKA

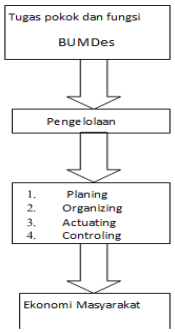
1.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu yang relavan dan sudah dilakukan tentang badan usaha milik desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. maka dari itu kajian-kajian terdahulu membantu calon peneliti dalam menambah referensi dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang di gunakan sebagai bahan perbandingan dapat dilihat dalam Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Data Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Pagrah Budiono (2015) Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa Desa di Bojonegoro, (http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jpm3c02209 97c1f.pdf), Di unduh pada tanggal 20 November 2021, 13:45 Wita.	Deskripsi Kualitatif	Implementasi kebijakan badan usaha milik desa di Boinenggoro terdapat faktor yang mempengaruhi hasil implementasi dilihat dari keamanan kepentingan anatara masyrakat dengan pelaksana kebijakan ini. Kebijakan tersebut berjalan dengan baik ditandai dengan meningkatnya hasil petanian masyrakatdan juga pendapatan asli desa. Pemerintah vanstertstap dikarenakan adanya kepentingan individu yang cenderung mempersulit pelebaran jenis usaha yang dijalankan Bumdes ini menjadi implementasi kebijakantidak tercapai,dalam menyajikan kepatuhan pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan melakukan evaluasi vanstilahrdikenaleh pemerintahdesa untuk mengontrol dan mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan.	Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan masalah Bumdes	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terletak padafokus penelitian dimana indikator penelitian terdahulunu berfokus pada kekuasaan dan kepentingan aktor, karakteristik lembaga pemerintah desa, kepatuhandan respon pelaksana kebijakan.Sedangkan penelitianini fokuspadaindikator optimalisasi BUMDesadalam pembangunan dan mempercepat ekonomi desa
2.	Dra. Harniati, M.Si (2017), "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya	Deskripsi Kualitatif	Terdapat dua hal ša penting yang menjadi fokus dalam menganalisa peran BUMDes sebagai lembaga usaha dan perekonomian masyarakat desa yaitu 1).	ma-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan masalah Bumdes	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terletak pada fkus penelitian di mana indikatorperanan BUMDes di lihat dari: 1).

i. **Kerangka Berpikir**



METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara dengan pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat
2. Observasi langsung kegiatan BUMDes
3. Dokumentasi data desa

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Menurut Abdurrahman (2011:96) Penelitian lapangan adalah "suatu penelitian yang dilakukan di lapangan/lokasi penelitian, tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelediki gejala objek yang terjadi di lokasi tersebut, yang di lakukan juga untuk penelitian ilmiah" Penelitian ini dilaksanakan di Desa Benu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.

Menurut Sutrisno (1995:3) Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu "hanya semata-mata mengambarkan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum Sehingga akan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi yang terjadi di lapangan untuk kemudian diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas. Penelitian ini berupa keterangan-keterangan bukan hanya berupa bilangan hitungan. Dimana, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan tentang Pembanguan Di Desa Benu Melalui BUMDes Untuk mengoptimalkan kembalik tugas dan tanggung jawab BUMDes.

Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitiannya yaitu melalui fokus penelitian akan dapat membatasi studi yang diteliti Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak dalam melimpahnya volume data yang diperoleh dilapangan penerapan fokus penelitian berfungsi dalam membatasi studi. Dengan adanya fokus penelitian penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak dan menetapkan kriteria-kriteria inklusi-inklusi atau masukan-masukannya. Berikut ini, adapun beberapa fokus penelitian yaitu:

Fokus Penelitian

Tabel 3.1 Beberapa

No	Fokus	Definisi Operasional	Sub Fokus
	Planning (Perencanaan)	Metapkan Berbagai Program Kegiatan Sesuai Anggaran Dalam Mengelola Bumdes di Desa Benu Kecamatan Takari kabupaten Kupang	EMenentukan progran Kerja. Menetapkan Anggaran Kerja. menetapkan Hasil Kerja.
	Organizing (Pengorganisasian)	Pengelompokan orang-orang sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam pengelolaan Bumdes di Desa Benu Kecamatan Takari Kabupten Kupang	Pembagian Kerja dalam Bumdes dan tanggung jawab dalam Tugas.
	Actuacting	Pengarahkan Seluruh Anggota	Memberi arahan bimbingan

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif** dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Benu. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, proses, dan kondisi sosial secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BUMDes itu didirikan atas dasar inisiatif masyarakat yang didasarkan pada potensi-potensi yang ada didesa dan harus menggunakan Sumber Daya

Kybernology **ISSN 3031-1063**
Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Volume 4 Nomor 1, Juni 2026
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology

Manusia yang memadai. Adapun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian didesa dan dibentuknya berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes juga didirikan dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan perataan ekonomi pedesaan.

Kondisi Umum Desa Benu

Kecamatan Takari merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terdiri atas 10 desa/kelurahan, yaitu Takari, Noelmina, Benu, Hueknutu, Kauniki, Oelnaineno, Tanini, Oesusu, Tuapanaf, dan Fatukona. Salah satu di antaranya adalah Desa Benu, yang terletak di wilayah Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan menjadi bagian penting dari kawasan pedesaan di kecamatan tersebut. Menurut data tahun 2024, Desa Benu memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.444 jiwa, terdiri dari 1.279 laki-laki dan 1.165 perempuan.

Tabel 1. Data Desa Benu (2024)

Keterangan	Jumlah / Nilai
Luas Wilayah	66,51 km²
Jarak dari Kecamatan	10 km
Jarak dari Kabupaten	25 km
Jumlah Penduduk	2.444 jiwa
- Laki-laki	1.279 jiwa (52,3%)
- Perempuan	1.165 jiwa (47,7%)
Kepadatan Penduduk	±36,7 jiwa/km²

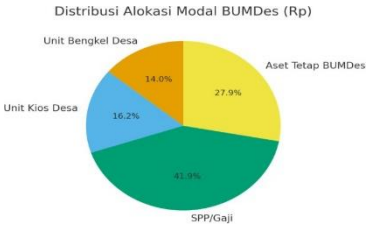


Diagram 1. Distribusi Alokasi Modal BUMDes

Unit Usaha dan Modal

Tabel 7. Unit usaha dan Modal BUMDes Benu dengan modal awal Rp. 179.000.000.

Unit Usaha	Modal (Rp)	Persentase	Fungsi Ekonomi
Unit Bengkel Desa	25.000.000	13.97%	Usaha jasa produktif
Unit Kios Bumdes	29.000.000	16.20%	Penyedia kebutuhan pokok
SPP/Gaji	75.000.000	41.90%	yerap tenaga kerja
Aset Tetap BUMDes	50.000.000	27.93%	estasi jangka panjang

Total modal awal: Rp 179.000.000

Perencanaan (planning)

Perencanaan tahunan telah disusun namun masih kurang analisis pasar dan proyeksi risiko. Menurut Terry (2014), perencanaan harus sistematis dan berbasis data, oleh karena itu BUMDes perlu memperkuat proses perencanaan dengan studi kelayakan usaha.

Dalam aspek *planning* pada pengelolaan BUMDes di Desa Benu, terdapat tiga subfokus utama yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja. Pertama, menentukan program

kerja, yaitu proses merancang dan memilih kegiatan atau unit usaha yang akan dijalankan BUMDes sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Penentuan program kerja ini memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

Untuk melengkapi data hasil wawancara dari pihak pengelola BUMDes, peneliti juga menggali pandangan masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampak perencanaan unit usaha BUMDes. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu masyarakat Desa Benu berikut ini:

"Menurut saya, adanya bengkel BUMDes ini sangat membantu kami sebagai masyarakat. Selama ini kalau kendaraan rusak harus ke kota yang jaraknya jauh. Dengan adanya bengkel di desa, kami lebih mudah dan biaya juga lebih terjangkau." Mundus Tunmuni Masyarakat DesaBenu (Senin,5 Mei 2025)

Ketiga, menetapkan hasil kerja, yaitu merumuskan target atau capaian yang ingin diwujudkan dari setiap program, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, pelayanan kepada masyarakat, maupun pengembangan aset desa. Dengan adanya target yang jelas, pengurus BUMDes dapat memiliki acuan dalam mengukur keberhasilan kegiatan. Secara keseluruhan, subfokus tersebut menjadikan perencanaan sebagai tahap penting untuk memastikan BUMDes berjalan terstruktur dan berorientasi pada tujuan pembangunan ekonomi desa.Adapun data hasil wawancara dari berbagai informan mengenai unit usaha Bengkel Bumdes Sahabat. Bengkel BUMDes adalah salah satu unit usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Sahabat).

Bengkel BUMDes adalah salah satu unit usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dengan unit usaha bengkel dapat memberikan layanan seperti: perbaikan kendaraan: Servis rutin, perbaikan mesin, dan lain-lain. Penjualan suku cadang dengan menyediakan suku cadang asli atau kw untuk kendaraan. Layanan lainnya: Seperti pengisian angin, oli, dan lain-lain. Dengan adanya BUMDes yang memiliki unit usaha bengkel, masyarakat desa dapat memperoleh layanan yang lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, BUMDes juga dapat meningkatkan pendapatan desa dan memberikan kontribusi pada perekonomian lokal.

"Setiap program yang direncanakan memiliki target yang ingin dicapai, terutama peningkatan pendapatan BUMDes dan pelayanan kepada masyarakat. Target tersebut menjadi acuan kami dalam menilai apakah unit usaha bengkel berjalan dengan baik atau perlu dilakukan perbaikan." Bapak Junus Dale(: Ketua BUMDes Sahabat) (Senin,5 Mei 2025)

*Kutipan Pendukung dari Pemerintah

Desa

"Pemerintah Desa mendukung perencanaan BUMDes dengan memastikan setiap rencana kerja dan anggaran disusun secara jelas dan dilaporkan secara transparan. Hal ini penting agar pengelolaan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat." Bapak Paulus Pitay(Kepala Desa)
(Senin,5 Mei 2025)

Pengorganisasian (Organizing)

Pada aspek *organizing*, pengelolaan BUMDes di Desa Benu dilakukan melalui dua subfokus utama yang memastikan struktur kerja berjalan tertib dan efektif. Subfokus pertama adalah **pembagian kerja dalam BUMDes**, yaitu proses mengatur dan membagi tugas sesuai posisi dan kemampuan masing-masing anggota, seperti direktur, sekretaris, bendahara, dan pengelola unit- unit usaha. Pembagian kerja ini penting agar setiap kegiatan operasional memiliki penanggung jawab yang jelas serta untuk menghindari tumpang tindih tugas.

Kutipan Pendukung dari Pemerintah Desa"Dalam pengelolaan BUMDes, pembagian kerja sudah ditentukan sesuai struktur organisasi. Direktur bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh kegiatan, sekretaris mengurus administrasi dan laporan, bendahara mengelola keuangan, sedangkan masing-masing unit usaha, termasuk kios BUMDes, memiliki pengelola tersendiri agar kegiatan operasional berjalan dengan baik." Bapak Foni Takaen(Pengurus BUMDes Sahabat Benu)
(Senin,5 Mei 2025)

Pembagian kerja dalam struktur organisasi BUMDes juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu masyarakat Desa Benu menyampaikan bahwa:

"*Kami sebagai masyarakat melihat pengelolaan BUMDes sudah cukup tertata. Setiap kali datang ke kios BUMDes, selalu ada petugas yang bertanggung jawab, sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik." Bapak Ones Sole (Masyarakat Desa Benu) (Selasa ,6 Mei 2025)*

Subfokus kedua adalah **tanggung jawab dalam tugas**, yakni penegasan kewajiban dan wewenang setiap anggota dalam melaksanakan peran yang telah ditetapkan. Dengan adanya tanggung jawab yang jelas, setiap pengelola dapat bekerja secara lebih terarah, disiplin, dan akuntabel. *Kutipan Pendukung dari Pemerintah Desa

"Setiap pengelola memiliki tanggung jawab sesuai tugas yang diberikan. Pengelola kios bertanggung jawab atas operasional harian dan pencatatan

penjualan, sedangkan bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan.Dengan tanggung jawab yang jelas, pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah dipertanggungjawabkan." Ibu Foni Taefa(Bendahara BUMDes Sahabat Benu) (Senin,5 Mei 2025)

Kejelasan tanggung jawab masing-masing pengelola BUMDes tercermin dari pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu masyarakat Desa Benu sebagai berikut:

"Pelayanan di BUMDes jelas, karena petugasnya tahu tugas masing-masing. Kalau soal pembelian atau pencatatan, langsung ditangani oleh orang yang memang bertugas di bagian itu." Ibu Eflin Matnay (Masyarakat Desa Benu) (Selasa ,6 Mei 2025)

Sebagai upaya memperkuat hasil penelitian melalui triangulasi sumber data, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Benu terkait aspek pengorganisasian BUMDes. Salah satu pernyataan masyarakat adalah sebagai berikut:

"Dengan adanya pembagian tugas yang jelas di BUMDes, kami sebagai masyarakat merasa lebih mudah saat membutuhkan layanan, karena tidak bingung harus berurusan dengan siapa." Ibu Emelinda Takaen(Masyarakat Desa Benu) (Selasa ,6 Mei 2025)

Kedua subfokus ini secara keseluruhan memastikan bahwa pengorganisasian BUMDes berjalan dengan baik, mendukung koordinasi antar pengelola, serta membantu pencapaian tujuan usaha secara efektif.

Pelaksanaan (Actuating)

Aspek *actuating* dalam pengelolaan BUMDes di Desa Benu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang berfokus pada upaya menggerakkan seluruh anggota agar melaksanakan tugas sesuai perencanaan. Subfokus utamanya adalah memberi arahan dan bimbingan, yaitu proses di mana pimpinan atau pengurus inti memberikan petunjuk, instruksi, serta motivasi kepada anggota BUMDes agar mereka memahami peran masing-masing dan dapat bekerja secara optimal. Arahan diberikan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan, sedangkan bimbingan berfungsi membantu anggota yang membutuhkan pendampingan dalam menjalankan tugas yang lebih teknis maupun administratif. Melalui arahan dan bimbingan yang berkesinambungan, proses penggerakan ini menciptakan koordinasi kerja yang lebih baik, meningkatkan semangat kerja, serta mendorong tercapainya tujuan BUMDes secara efektif. Aspek-aspek

pelaksanaan (*actuating*) dalam BUMDes :

A. Komunikasi dan koordinasi dengan menjalin komunikasi yang efektif antara pengurus dan perangkat desa untuk menciptakan pemahaman bersama dan menyelaraskan langkah-langkah yang akan diambil. Efektivitas komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes juga dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima informasi dan layanan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu masyarakat Desa Benu berikut ini:

"Kami melihat pengurus BUMDes sering berkomunikasi dengan perangkat desa dan masyarakat. Kalau ada kegiatan atau perubahan layanan, biasanya kami diberi tahu terlebih dahulu."Ibu Yani Kolmel(: Masyarakat Desa Benu) (Rabu,7 Mei 2025)

*Kutipan Pendukung dari Pemerintah Desa

"Dalam menjalankan kegiatan BUMDes, kami selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengurus lain serta perangkat desa. Setiap kegiatan dibahas bersama agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan tidak menimbulkan kesalahpahaman."

a) *Bapak Junus Dale (Ketua BUMDes Sahabat Benu)* Pemberian motivasi dengan memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada pengurus dan masyarakat agar aktif berkontribusi pada usaha BUMDes.

Pemberian motivasi kepada pengelola BUMDes turut berdampak pada semangat kerja yang terlihat dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Hal ini dirasakan langsung oleh masyarakat, sebagaimana pernyataan berikut:

"*Pengelola BUMDes kelihatan cukup aktif dan bertanggung jawab. Mereka bekerja dengan serius karena sering diberi arahan dan dorongan oleh pimpinan BUMDes." Bapak Eko Matnay (: Masyarakat Desa Benu) (Rabu,7 Mei 2025)*

*Kutipan Pendukung dari Pengurus Bumdes

"Kami memberikan motivasi kepada pengelola unit usaha dengan cara memberikan arahan dan dorongan secara langsung, supaya mereka tetap semangat dan merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha BUMDes." Bapak Dance Tunmuni(Direktur BUMDes Sahabat Benu) (Selasa,6 Mei 2025)

b) Pengelolaan sumber daya dengan memastikan sumber daya seperti modal dan tenaga kerja digunakan secara optimal dan terarah sesuai kebutuhan usaha, contohnya penyaluran kredit untuk modal usaha.

*Kutipan Pendukung dari Pengurus Bumdes

"Pengelolaan sumber daya dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan usaha. Modal yang ada digunakan secara bertahap dan diprioritaskan untuk kegiatan yang benar-benar mendukung operasional BUMDes." Ibu Foni Taefa (Bendahara BUMDes Sahabat Benu) (Senin,5 Mei 2025)

B. Penugasan dan pembagian kerja dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada setiap pihak yang terlibat agar operasional berjalan lancar. Pelaksanaan pembagian tugas yang jelas dalam kegiatan BUMDes tercermin dari pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh masyarakat Desa Benu berikut:

"*Pelayanan di BUMDes berjalan cukup baik karena petugasnya tahu tugas masing-masing. Kalau kami butuh layanan, langsung ditangani oleh pengelola yang bertugas." Bapak Indra Tunmuni (Masyarakat Desa Benu)*

*Kutipan Pendukung dari Pengurus Bumdes

"Setiap pengelola sudah diberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya pembagian kerja tersebut, kegiatan operasional dapat berjalan lebih teratur dan tidak saling tumpang tindih." Bapak Foni Takaen(Pengelola Unit Usaha BUMDes) (Selasa,6 Mei 2025)

C. Pengawasan dan bimbingan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan memberikan bimbingan serta solusi jika ada permasalahan, termasuk dukungan dari instansi terkait. Pengawasan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes juga dirasakan oleh masyarakat, terutama ketika terjadi kendala dalam pelayanan. Hal ini diungkapkan oleh informan berikut:

"Kalau ada masalah dalam pelayanan BUMDes, biasanya cepat ditangani. Pengurus langsung turun dan mencari solusi supaya pelayanan tetap berjalan."
Ibu Yani Kolmel(Masyarakat Desa Benu) (Rabu, 7 Mei 2025)

*Kutipan Pendukung dari Pengurus Bumdes

"Kami melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan memberikan bimbingan apabila terdapat kendala. Jika ada masalah, kami langsung membicarakannya agar segera ditemukan solusi." Bapak Sefrit Boemau(Sekretaris BUMDes Sahabat Benu) (Senin,5 Mei 2025)

D. Penerapan prinsip manajemen

dengan mengoperasikan BUMDes dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainable*.

*Kutipan Pendukung dari Pemerintah Desa

"Dalam pelaksanaan BUMDes, kami berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap kegiatan dan penggunaan dana dilaporkan secara terbuka kepada pemerintah desa dan masyarakat." Bapak Paulus Pitay(Kepala Desa Benu) (Senin,5 Mei 2025)

Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dalam pengelolaan BUMDes Desa Benu dilakukan melalui beberapa sub-fokus utama, yaitu pemantauan, penilaian pelaksanaan, tindakan korektif, dan pelaporan. Pertama, aspek pemantauan (monitoring) dilakukan dengan cara pengawas, kepala desa, dan direktur BUMDes melakukan pemantauan langsung terhadap orang-orang yang melaksanakan kegiatan BUMDes. Pemantauan ini meliputi pengamatan terhadap proses kerja harian, penggunaan modal, pencatatan transaksi, kualitas pelayanan, serta kedisiplinan pengelola unit usaha. Melalui pemantauan langsung tersebut, pengelola dapat mengetahui apakah setiap aktivitas telah berjalan sesuai dengan rencana kerja tahunan dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pemantauan kegiatan BUMDes juga diketahui dan dirasakan oleh masyarakat Desa Benu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu masyarakat berikut ini:

"Kami sering melihat pengurus dan kepala desa datang memantau kegiatan BUMDes. Mereka melihat langsung bagaimana usaha dijalankan dan menanyakan kondisi pengelola." Ibu fani Dale(Masyarakat Desa Benu) (Senin,5 Mei 2025)

*Kutipan Pendukung dari Pengurus Bumdes

"Pengawasan kami lakukan dengan cara memantau langsung kegiatan BUMDes, terutama operasional unit usaha. Kami melihat bagaimana proses kerja harian, penggunaan modal, serta pencatatan transaksi agar semuanya sesuai dengan rencana dan aturan yang sudah ditetapkan." Bapak Dance Tunmuni(Direktur BUMDes Sahabat Benu) (Senin,5 Mei 2025)

Kedua, aspek penilaian pelaksanaan (evaluating performance) dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan BUMDes. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil aktual di lapangan dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, seperti jumlah keuntungan, jumlah pelanggan,

tingkat pengembalian pinjaman, atau peningkatan aset. Pengelola juga melakukan penilaian terhadap kinerja setiap unit usaha, khususnya terkait efektivitas tugas masing-masing pengelola dan dampak kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Benu. Melalui evaluasi ini, BUMDes dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan sudah berada pada jalur yang benar. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMDes tercermin dari adanya perbaikan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh masyarakat Desa Benu sebagai berikut:

"Kalau ada kekurangan dalam pelayanan BUMDes, biasanya cepat diperbaiki. Setelah itu pelayanan jadi lebih baik dari sebelumnya." Ibu Wasti Sole(Masyarakat Desa Benu) (Rabu,7Mei 2025)

*Kutipan Pendukung dari Pengurus Bumdes

"Setiap periode tertentu kami melakukan evaluasi dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang sudah direncanakan. Dari situ kami bisa mengetahui apakah unit usaha sudah berjalan baik atau masih perlu perbaikan."
Bapak Agus Pitay(Ketua Badan Pengawas BUMDes) (Senin,5 Mei 2025)

Ketiga, aspek tindakan korektif (corrective action) dilakukan apabila dalam proses pemantauan dan evaluasi ditemukan hambatan, ketidaksesuaian, atau penyimpangan. Tindakan korektif dapat berupa pemberian arahan kepada pengelola, penyesuaian strategi usaha, pembenahan administrasi, hingga pelaksanaan pelatihan bagi pengurus yang masih kurang memahami tugasnya. Dalam beberapa kasus, tindakan korektif juga bisa berupa teguran atau sanksi sesuai aturan BUMDes apabila terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan dapat kembali berjalan sesuai ketentuan dan mencapai target yang direncanakan. Pelaksanaan tindakan korektif dalam pengelolaan BUMDes juga dirasakan oleh masyarakat, khususnya ketika terjadi permasalahan dalam kegiatan usaha. Hal tersebut diungkapkan oleh informan berikut:

"Saat ada masalah dalam pengelolaan BUMDes, pengurus langsung menegur dan memberi arahan supaya tidak terulang lagi. Kami lihat ada usaha untuk memperbaiki." Bapak Aldi Daeng(Masyarakat Desa Benu) (Kamis ,8Mei 2025)

*Kutipan Pendukung dari Pengurus Bumdes

"Jika dalam pengawasan ditemukan masalah atau ketidaksesuaian, kami segera mengambil tindakan, seperti

memberikan arahan, memperbaiki sistem administrasi, atau menyesuaikan strategi usaha. Tujuannya agar kegiatan BUMDes kembali berjalan sesuai ketentuan."
Bapak Sefrit Boemau(Sekretaris BUMDes Sahabat Benu) (Senin,5 Mei 2025)

Keempat, aspek pelaporan (reporting) merupakan tahapan akhir dalam proses pengawasan. Pada tahap ini, hasil pemantauan dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian indikator, kendala yang ditemukan, serta rekomendasi perbaikan. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Desa, Badan Pengawas, dan masyarakat melalui musyawarah desa. Pelaporan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta perbaikan perencanaan BUMDes pada periode berikutnya sehingga pengawasan dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. Transparansi dalam pelaporan pengelolaan BUMDes juga dirasakan oleh masyarakat Desa Benu. Hal ini terlihat dari penyampaian laporan kegiatan dalam forum musyawarah desa, sebagaimana disampaikan oleh masyarakat berikut ini:

"Kami mengetahui laporan kegiatan BUMDes karena disampaikan saat musyawarah desa. Pengurus menjelaskan pendapatan dan perkembangan usaha secara terbuka." Ibu Maria Kefi (Masyarakat Desa Benu) (Rabu,7 Mei 2025)

*Kutipan Pendukung dari Pengurus Bumdes

"Setiap kegiatan dan hasil usaha BUMDes kami laporkan secara berkala kepada Kepala Desa dan Badan Pengawas. Laporan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa agar pengelolaan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka." Ibu Foni Taefa(Bendahara BUMDes Sahabat Benu) (Senin,5 Mei 2025)

Diagram 2. ROI (%) Per Unit Usaha BUMDes yang Tersedia Data

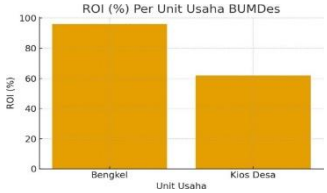


Diagram di atas menunjukkan tingkat Return on Investment (ROI) atau tingkat pengembalian investasi (%) untuk dua unit usaha BUMDes, yaitu Bengkel dan Kios Desa. ROI menggambarkan seberapa besar keuntungan bersih yang diperoleh dibandingkan dengan jumlah modal yang diinvestasikan, sehingga menjadi indikator efisiensi dan profitabilitas usaha.

1) Bengkel (ROI ≈ 96%)

Nilai ROI yang sangat tinggi menunjukkan bahwa unit usaha Bengkel memiliki efisiensi modal yang

sangat baik. Artinya, hampir seluruh modal yang ditanamkan berhasil kembali dalam bentuk keuntungan bersih. Hal ini menandakan bahwa usaha bengkel beroperasi dengan biaya yang efisien, memiliki permintaan jasa yang stabil, serta mampu menghasilkan keuntungan signifikan dibandingkan dengan modal awal. Selain itu, tingginya ROI juga menunjukkan bahwa unit bengkel berpotensi menjadi sumber pendapatan utama BUMDes jika dikembangkan lebih lanjut, baik melalui peningkatan kapasitas layanan maupun diversifikasi usaha (misalnya layanan tambahan atau penjualan suku cadang).

2) Kios Desa (ROI ≈ 62%)

ROI pada unit usaha Kios Desa masih tergolong cukup baik, karena mampu memberikan pengembalian lebih dari separuh modal yang diinvestasikan. Namun, tingkat ROI ini lebih rendah dibandingkan unit Bengkel, yang bisa disebabkan oleh margin keuntungan yang tipis akibat persaingan harga, biaya operasional harian, atau perputaran barang dagang yang lebih lambat. Meski demikian, Kios Desa tetap berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal karena menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, menjaga stabilitas harga, dan memutar ekonomi desa secara berkelanjutan.

Analisis SWOT

Kekuatan: Modal cukup, dukungan masyarakat
Kelemahan: SDM terbatas, belum digital
Peluang: Pengembangan usaha baru
Ancaman: Persaingan dan risiko kredit macet

6. Dampak Ekonomi dan Sosial

BUMDes memberikan dampak positif seperti:

1) Penciptaan lapangan kerja
2) Peningkatan pendapatan masyarakat
3) Mempermudah akses layanan ekonomi
4) Menurut Chambers (1995), partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa.

KESIMPULAN

Pengelolaan BUMDes telah berjalan berdasarkan fungsi manajemen, namun belum optimal. Kendala utama adalah keterbatasan SDM dan kurangnya inovasi usaha. BUMDes memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi masyarakat desa.

Saran

Pemerintah desa perlu meningkatkan pelatihan pengelola BUMDes Pengurus perlu meningkatkan profesionalisme dan inovasi usaha Masyarakat perlu meningkatkan partisipasi Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian lebih luas

DAFTAR PUSTAKA

Ali. (2014). *Analisis optimalisasi pelayanan berdasarkan teori*

antrian di Samarinda. E-Journal Ilmu Administrasi, 2(3).

Adi, I. R. (2015). *Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Agit, Alamsyah dkk, Peran Dan Kontribusi Teknologi Dalam Menunjang Potensi Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pedesaan, Artikel Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK), 2023.

Anzizhan, Syafaruddin. Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan. Jakarta: PT Grasindo, 2019.

Astutiningsih, Sri Eka., and Citra Mulya Sari. "Pemberdayaan kelompok agroindustri dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur." Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan 2.1 (2017): 1-9.

Budiono, P. (2015). *Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Bojonegoro*. Diunduh dari http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jpm3cd22097c1f.pdf

Diakses pada 20 November 2021, pukul 13.45 WITA.

Badu, Syamsu Q. and Novianti Djafri. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Gorontalo : Ideas Publishing, 2017.

Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, PKDSP Universitas Brawijaya. (2007). *Buku panduan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan: PP-RPDN.

Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. Journal of Rural and Development, 5(1), 1-14.

Fadiah, I. N. (2020). *Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwokerto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*. Universitas Semarang.

Filya, A. R. (2018). Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 5(1), 19-39.

Febriani, Nia. Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya. Diss. UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022.

Hade, Satria. Optimalisasi Peran Badan

Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa Di Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat). Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Husna, Asmaul dan Budi Suryana, Metodologi Penelitian Dan Statistik, 1. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, 2017.

Kusuma, G. H. (2016). *BUMDes: Kewirausahaan sosial yang berkelanjutan*. Yogyakarta: Penabulu Fund.

Harmiati, D. (2017). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat desa di era MEA*. PSA FISIP UniHAZ Bengkulu.

Harmiati, D. (2017). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat desa yang berdaya saing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN*.

Diunduh dari http://setnas-asean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0f03a8a119-14-cluster-ekonomi- unihaz.pdf

Diakses pada 20 November 2021, pukul 06.45 WITA.

Ibrahim, J. (2018). *Hukum dan regulasi BUMDes di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Ismail, Andi Reni Anggraeni., and Muhammad Anis. "Peningkatan Perekonomian Desa Melalui Peran Bumdes Assingkerukengnge Perspektif Siyasah Syar'iyyah." Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah 3.1 (2022): 96-107.

Jaya, Rony and Mhd. Rafi, "Analisis Hambatan Dalam Pengembangan BUM DESa (Studi Kampung Rempak Kabupaten Siak).Jurnal El-Riyasah, Vol. 9, No. 1.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). *Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan peraturan turunannya*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Kasmaroesid, Herry. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Kusuma, A. (2020). Optimalisasi badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. *Jurnal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 5(2), 101–115.

Moleong, L. J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mubyarto. (2000). *Reformasi sistem ekonomi*. Yogyakarta: UII Press.

Muhadjir, N. (1998). *Metodologi penelitian kualitatif: Pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metafisik*. Yogyakarta.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutarjo. (2019). Peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 45–55.

Usman, S. (2015). *Esai-esai sosiologi perubahan sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widyastuti, Y. (2017). *Peran Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimulyo Kabupaten Lampung Tengah*. Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

Wijaya, H. (2018). Pengelolaan BUMDes sebagai instrumen pembangunan desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(3), 221–230.